

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

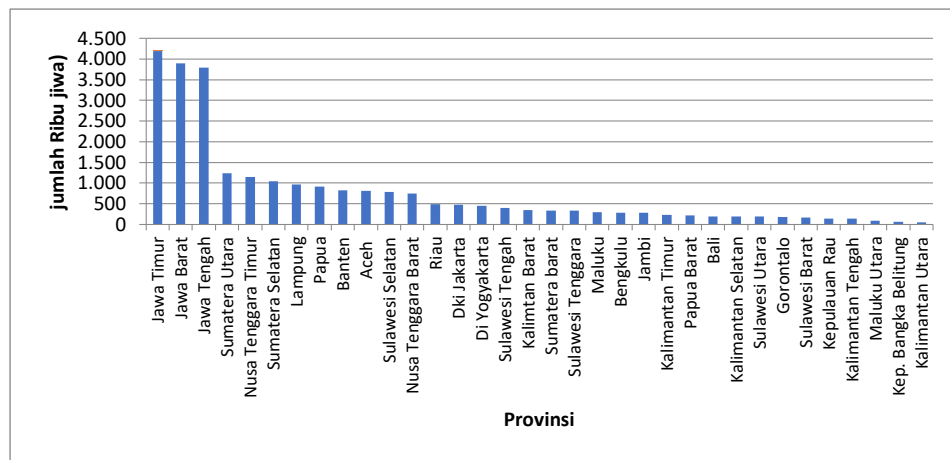
Salah satu indikator untuk melihat sebuah keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dari negara tersebut setiap tahunnya (Nafi, 2021). Pembangunan didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai peningkatan dalam pertumbuhan per-kapita sehingga permasalahan seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pendapatan tidak lagi menjadi masalah (Niken Pratiwi *et al*, 2018). Pembangunan bukan hanya mengejar kebutuhan jangka pendek ataupun kebutuhan sementara namun juga harus memperhatikan untuk masa depan atau jangka panjang. Pentingnya pembangunan ekonomi yang stabil bagi Negara sedang berkembang seperti Indonesia sangatlah besar. Dikarenakan hal tersebut mampu menangani berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya literasi, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memberikan fokus yang lebih pada sektor kesehatan dan pendidikan (Sari *et al*, 2020).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk membayar tingkat kehidupan yang umum dinikmati oleh penduduk suatu wilayah kondisi atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Faturahman, 2019). Kemiskinan merupakan fenomena sosio-ekonomi global, hal ini selalu menjadi masalah di semua negara termasuk negara berkembang dan negara maju. Belum ada konsep kemiskinan secara keseluruhan

karena konsep ini berkaitan dengan situasi pembangunan sosial-ekonomi masing-masing negara tertentu. Selain itu sulit untuk menentukan penyebab kemiskinan dan apa yang membantu mengurangi kemiskinan (Ha *et al.*, 2021)

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah terhadap semua masyarakatnya. Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Wulandari & Aisyah, 2021). Kemiskinan di Indonesia menjadi persoalan yang rumit karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi. Beberapa hal yang ikut berperan dalam menyebabkan kemiskinan di Indonesia termasuk tingkat inflasi, upah minimum, dan juga peran pemerintah yang tidak optimal (Pramu & Hutajulu, 2023).

Di Indonesia, salah satu provinsi yang mempunyai permasalahan kemiskinan yaitu Jawa Timur, berdasarkan data dari BPS (2023) Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Jawa Timur adalah masalah kemiskinan yang cukup serius dikarenakan provinsi Jawa Timur pada Maret 2023 menempati posisi pertama provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak nasional (BPS, 2023).



Gambar 1.1 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Nasional Tahun 2023 (ribu jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur apabila di bandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu sebesar 4.189 ribu jiwa yang menunjukkan bahwa kemsikinan di Jawa Timur merupakan permasalahan yang cukup serius. Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan bahwa Jawa Timur terbelakang jauh dalam upaya pengentasan kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia (gambar 1.1)

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, akan tetapi juga memiliki gambaran yang buruk tentang kemiskinan. Pulau Madura memiliki populasi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten miskin di Jawa Timur. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) Pulau Madura memiliki jumlah persentase sebesar 17,57% lebih besar dari tingkat kemiskinan nasional 9,57%. 4 kabupaten yang ada di Madura yaitu

Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, menduduki puncak daftar daerah dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/kota Di Jawa Timur Tahun 2020-2023

Kabupaten/ kota	Persentase penduduk miskin (persen)			
	2020	2021	2022	2023
Sampang	22.78	23.76	21.61	21.76
Bangkalan	20.56	21.57	19.44	19.35
Sumenep	20.18	20.51	18.76	18.70
Probolinggo	18.61	18.91	17.12	17.19
Tuban	15.91	16.31	15.02	14.91
Ngawi	15.44	15.57	14.15	14.40
Pamekasan	14.60	15.30	13.93	13.85
Pacitan	14.54	15.11	13.80	13.65
Bondowoso	14.17	14.73	13.47	13.34
Lamongan	13.85	13.86	12.53	12.42
Bojonegoro	12.87	13.27	12.21	12.18
Gresik	12.40	23.76	11.06	10.96
Situbondo	12.22	12.63	11.78	11.90
Nganjuk	11.62	18.91	10.70	10.89
Tranggelek	11.62	21.57	10.96	10.63
Madiun	11.46	20.51	10.79	11.04
Kediri	11.40	16.31	10.65	10.72
Mojokerto	10.57	15.30	9.71	9.80
Magetan	10.35	15.57	9.84	9.80
Malang	10.15	15.11	9.55	9.45
Jember	10.09	14.73	9.39	9.51
Ponorogo	9.95	13.86	9.32	9.53
Jombang	9.94	10.00	9.04	9.15
Lumajang	9.83	13.27	9.06	8.93
Blitar	9.33	9.65	8.71	8.69
Pasuruan	9.26	9.70	8.96	9.24
Banyuwangi	8.06	8.07	7.51	7.34
Kota Blitar	7.78	7.89	7.37	7.30
Kota Kediri	7.69	7.75	7.23	7.15
Kota Probolinggo	7.43	7.44	6.65	6.48
Tulungagung	7.33	7.51	6.71	6.53
Kota pasuruan	6.66	6.88	6.37	6.60
Kota mojokerto	6.24	6.39	5.98	5.77
Sidoarjo	5.59	5.93	5.36	5.00
Kota surabaya	5.02	5.23	4.72	4.65
Kota madiun	4.98	5.09	4.76	4.74
Kota malang	4.44	4.62	4.37	4.26
Kota batu	3.89	4.09	3.79	3.31

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Madura menempati posisi teratas daerah penyumbang kemiskinan tertinggi di provinsi Jawa Timur yang dimana menunjukkan bahwa

kemiskinan di Pulau Madura merupakan permasalahan yang cukup serius. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2023 pulau Madura selalu menempati posisi teratas dengan jumlah presentasi penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Timur (tabel 1.1).

Tingginya jumlah penduduk miskin di Pulau Madura maka dibutuhkannya perhatian lebih untuk mengatasi kemiskinan. Menurut Firstiani & Egamawati, (2021) kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, termasuk pendidikan masyarakat yang rendah, ketika tingkat pendidikan masyarakat rendah, kemampuan mereka dalam berbagai keterampilan juga terbatas. Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yaitu dengan adanya anggaran bidang pendidikan (Riva *et al*, 2021). Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Menurut Maarif (2020) pendidikan adalah alat yang dapat membawa perubahan pada manusia.

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat membawa perubahan pada manusia (Maarif, 2020). Dengan adanya pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan generasi yang memiliki kecerdasan, dan dapat memberikan perananan penting pada perekonomian (Cahyani & Muljaningsih, 2022). Pendidikan memberikan banyak pengetahuan yang lebih baik bagi setiap orang, pengetahuan yang diperoleh dalam dunia pendidikan dapat digunakan di dunia kerja. Menurut Tjiabrata *et al.*, (2021) pendidikan adalah landasan terpenting dalam mencari pekerjaan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluang

mendapatkan pekerjaan yang layak, dikarenakan dapat meningkatkan pengetahuan. Sebaliknya, pendidikan yang rendah maka pengetahuan terbatas dan akan sulit bersaing di dunia kerja, dan berujung pada pengangguran.

Tingginya tingkat pengangguran di suatu negara, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat dikarenakan masyarakat yang menganggur tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari (Adam *et al.*, 2022) . Apabila masyarakat tidak menganggur maka akan mempunyai pekerjaan dan pendapatan, dengan adanya pendapatan yang di miliki maka diharapkan dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan tergolong sebagai kategori miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah (Ayu Nurlita *et al.*, 2017)

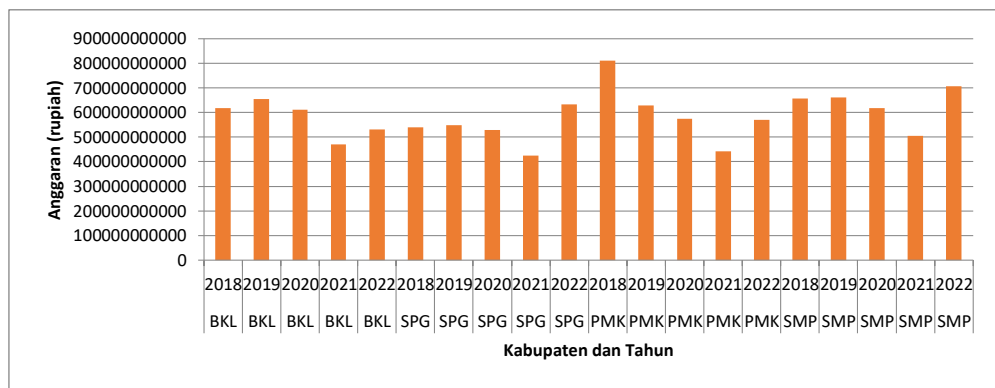
Masalah kemiskinan melibatkan berbagai aspek salah satunya pendidikan. keterbatasan keuangan yang dialami oleh keluarga yang miskin dapat menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah. Pada dasarnya, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki keterbatasan dalam usaha serta akses terhadap kegiatan ekonomi (Carolina, 2022). Pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan mengembangkan sumber daya manusia melauai pendidikan, yang akan meningkatkan produktivitas individu.

Tingkat pendidikan yang tinggi dan ketersediaan fasilitas pendidikan dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan (Giovanni, 2018). Investasi pada bidang pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai seseorang, semakin besar pula peningkatan dalam pengetahuan dan keahlian yang di miliki yang dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam bekerja. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan produktivitas, dan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial (Putri & Putri, 2021).

Bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia berupa anggaran bidang pendidikan, sehingga dapat memberikan peranan penting dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta pengetahuan masyarakat yang semakin luas sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja, salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yaitu dengan adanya anggaran bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pemerintah pada sektor pendidikan akan menghasilkan produktivitas penduduk (Maarif, 2020). Pendapatan akan semakin meningkat sesuai dengan produktivitas kerja seseorang, pendapatan yang semakin meningkat dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan di karenakan dengan adanya pendapatan yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan diharapkan dapat memajukan pembangunan manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya ,manusia dan

mengurangi tingkat kemiskinan (Wardhana & Kharisma, 2019). Berikut ini merupakan data anggaran pemerintah bidang pendidikan di Pulau Madura dari tahun 2018-2020.



Gambar 1.2 Anggaran Bidang Pendidikan di Pulau Madura Tahun 2018-2022

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

Anggaran bidang pendidikan di Pulau Madura dari tahun 2018-2022 mengalami variasi di setiap kabupaten, dengan beberapa periode mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Penyebab fluktuasi ini bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan pendidikan lokal. Anggaran bidang pendidikan di kabupaten bangkalan mulai dari tahun 2018-2022 menunjukkan variasi, dengan anggaran tertinggi pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Kabupaten Sampang juga mengalami variasi dalam anggaran pendidikan dari tahun 2018-2022. Tercatat peningkatan yang signifikan tahun 2021 ke tahun 2022. Anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Pamekasan juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021, diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun 2022. Anggaran pendidikan di Kabupaten

Sumenep juga menunjukkan fluktuasi, dengan jumlah anggaran tertinggi pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebelum kembali meningkat pada tahun 2022 (gambar 1.2).

Selain anggaran bidang pendidikan anggaran bidang kesehatan juga sama pentingnya dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Hidayat & Azhar, (2021) anggaran pemerintah di bidang kesehatan merupakan komponen penting dalam mengukur tingkat kemiskinan. Tingginya penduduk miskin masih di picu oleh kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Jika rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan dasar masyarakat agar mencapai produktivitas yang optimal melalui peningkatan kesehatan.

Kesehatan dapat meningkatkan produktivitas seseorang, seseorang yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi lebih produktif dalam bekerja, memiliki pendapatan yang lebih tinggi (Wardhana & Kharisma, 2019). Tidak hanya menjadi lebih produktif ketika memiliki tingkat kesehatan yang baik namun juga akan berdampak pada pendapatan yang di terima, peningkatan pendapatan juga akan berdampak pada peningkatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mengurangi kemiskinan (Aprilia & Triani, 2022).

Hal penting yang perlukan dalam pengentasan kemiskinan dibutuhkannya investasi dari pemerintah yang berupa anggaran bidang

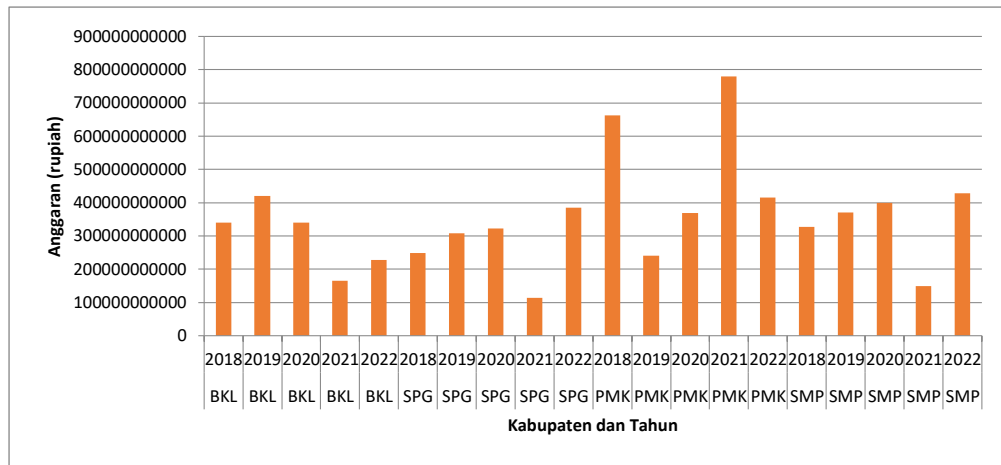
kesehatan. Anggaran pemerintah bidang kesehatan dianggap sebagai upaya investasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan karena kesehatan dianggap sebagai fondasi utama pembangunan manusia yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan menuju kesejahteraan (Fadillah & Sabar, 2023). Untuk mencapai kesejahteraan dan mencapai taraf hidup yang layak bagi masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan sektor kesehatan melalui kebijakan anggaran yang tepat di sektor kesehatan. Dengan meningkatkan anggaran pemerintah di bidang kesehatan, diharapkan dapat memperbaiki pembangunan manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Wardhana & Kharisma, 2019). Anggaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu sektor publik yang menjadi prioritas pemerintah adalah kesehatan (Mahendra, 2020).

Anggaran pemerintah sangat penting untuk mendukung aspek kesehatan. Menurut Hidayat & Azhar, (2021) anggaran pemerintah yang di alokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan merupakan komponen penting dalam mengukur tingkat kemiskinan. kebijakan pemerintah di bidang kesehatan menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dengan biaya yang terjangkau, bahkan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai tanpa mengalami beban finansial.

Permasalahan utama yang terkait dengan kemiskinan adalah akses masyarakat miskin terhadap layanan-layanan dasar untuk kehidupan mereka, seperti layanan kesehatan. Disinilah pentingnya peran pemerintah, melalui anggaran bidang kesehatan dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan umum (Wardhana & Kharisma, 2019). Dengan adanya anggaran bidang kesehatan, akan tersedia fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Tingkat kesehatan yang baik menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, dengan tingkat mental yang lebih maju dan kemampuan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan (Hartono, 2023).

Anggaran bidang kesehatan mencakup semua alokasi dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara umum serta segala aspek yang mendukung kesehatan. Tujuan dari alokasi anggaran kesehatan didefinisikan sebagai sarana akuntabilitas, manajemen, dan instrument kebijakan ekonomi (Faturahman, 2019).

Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan diharapkan dapat memajukan pembangunan manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan (Wardhana & Kharisma, 2019). Berikut ini merupakan data anggaran pemerintah bidang kesehatan di Pulau Madura dari tahun 2018-2020.



Gambar 1.3 Anggaran Bidang Kesehatan di Paulau Madura Tahun 2018-2022

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

Terdapat fluktuasi dalam anggaran bidang kesehatan di semua kabupaten di Pulau Madura selama periode tahun 2018-2022. Kabupaten Bangkalan mendapatkan anggaran bidang kesehatan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 merupakan anggaran dengan jumlah terendah dalam periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2019 merupakan anggaran tertinggi. Kabupaten Sampang menerima anggaran bidang kesehatan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah anggaran kesehatan mencapai anggaran tertinggi sementara pada tahun 2021, jumlahnya Anggaran bidang kesehatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 dan 2021 sangat tinggi, sedangkan pada tahun-tahun lainnya jumlahnya lebih rendah. Kabupaten Sumenep memiliki variasi dalam anggaran bidang kesehatan pada tahun 2022, jumlah anggaran bidang kesehatan sangat tinggi, sementara pada tahun 2021, jumlahnya sangat rendah (Gambar 1.3).

Selain anggaran bidang pendidikan dan kesehatan, upah minimum sama pentingnya dalam mengatasi kemiskinan. Upah adalah

salah satu dari banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan (Ghinastari & Syafitri, 2024). Upah minimum adalah pembayaran bulanan terendah yang mencakup tunjangan distrik dan upah pokok, atau merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dan pihak lain untuk memberi kompensasi kepada pekerja (Saman & Chandriyanti, 2022). Tujuan utama menetapkan upah minimum adalah memastikan bahwa pekerja memiliki standar hidup minimal untuk kesehatan, produktivitas, kesejahteraan para pekerja khususnya pekerja yang miskin (Akbar *et al.*, 2022).

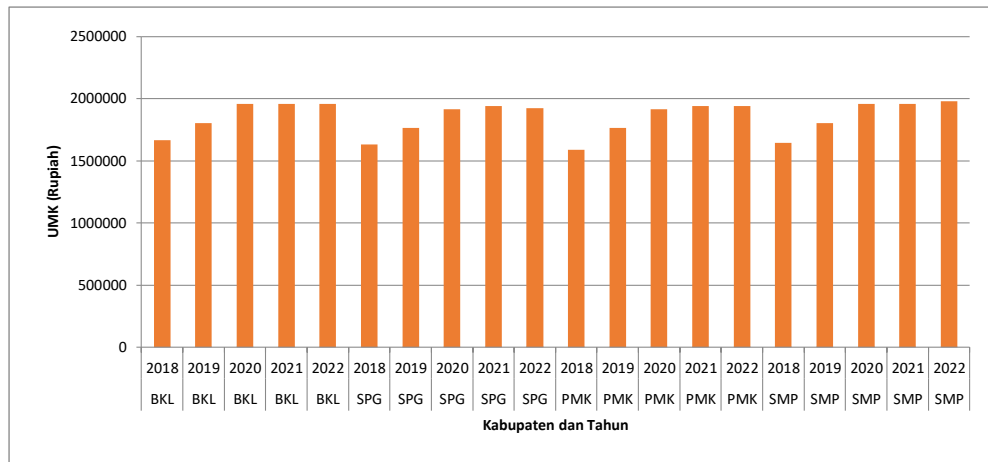
Upah minimum ditetapkan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup buruh. Kedua, sebagai jaringan pengaman yang bertujuan melindungi pekerja dari upah rendah. Jika efektif, upah minimum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dengan membantu orang miskin untuk meningkatkan kehidupan mereka (Safitri *et al.*, 2020). Salah satu hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah upah yang rendah dan upah yang berada dibawah upah minimum, karena hal tersebut menghalangi orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Ali Mauludi *et al.*, 2023). Upah yang rendah bisa terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas rendah dari sumber daya manusia akan secara langsung mempengaruhi produktivitas masyarakat (Sari, 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia. Upah minimum adalah salah satu kebijakan pengupahan yang diatur oleh pemerintah, yang menetapkan jumlah terendah yang harus dibayarkan

oleh perusahaan kepada pekerja mereka. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah terjadinya kemiskinan karena upah yang rendah (Ghinastari & Syafitri, 2024). Upah yang cukup tinggi dapat membantu mengurangi kemiskinan dikarenakan dapat memberi pekerja upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upah memiliki dampak terhadap kemiskinan karena upah rendah dapat mengakibatkan tingkat pendapatan yang rendah bagi penduduknya, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kusumo, 2022).

Meningkatnya upah minimum dapat memecah siklus kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada keluarga yang kurang mampu untuk keluar dari jeratannya. Semakin tinggi upah minimum memungkinkan untuk setiap individu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat membantu terbebas dari kemiskinan (Akbar *et al.*, 2022). Meningkatkan upah minimum dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun sebaliknya, upah yang rendah dapat memperburuk kemiskinan dan akan berdampak pada para pekerja yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan menerapkan upah minimum, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat, yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Oktaviana *et al.*, 2021). Berikut ini merupakan data upah minimum kabupaten di Pulau Madura dari tahun 2018-2022.



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2018-2022

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.

Gambar di atas menunjukkan upah minimum kabupaten di 4 kabupaten di Madura, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, dari tahun 2018-2020. Secara umum, upah minimum kabupaten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di antara keempat kabupaten, Sumenep memiliki upah minimum kabupaten tertinggi di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 di mana Bangkalan memiliki upah minimum kabupaten sedikit lebih tinggi. Kabupaten Sampang memiliki upah minimum terendah di antara kabupaten yang ada di Pulau Madura setiap tahunnya (gambar 1.4)

Adanya peran pemerintah yang dilakukan yaitu berupa anggaran dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan penetapan upah minimum kabupaten diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan namun apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin di Pulau Madura dapat diidentifikasi bahwa kinerja pemerintah belum optimal atau belum berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu perlukannya untuk mencari faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat

kemiskinan di Pulau Madura, sehingga bisa untuk di jadikan acuan bagi pemerintah di Pulau Madura dalam usaha untuk mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan terdapat berbagai permasalahan dan belum optimalnya pemerinatah dalam mengurangi angka kemiskinana di Pulau Madura. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Anggran Bidang Pendidikan, Anggran Bidang Kesehatan, Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas maka dapat di simpulkan beberapa permasalahan dalam penilitian ini yaitu sebgaai berikut:

1. Bagaimana pengaruh anggaran bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura?
2. Bagaimana pengaruh anggaran bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Madura

2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Madura
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten terhadap tingkat kemiskinan di pulau Madura

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penileitian yang sudah dijelaskan di atas di harapkan penlitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Lingkungan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literature kepustakaan di universitas trunojoyo madura serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa yang mencari informasi terkait dengan topik penelitian ini.

- b. Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan gelar sarjana dalam program studi Ekonomi Pembangunan, serta untuk meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan pemahaman ilmiah, khususnya terkait dengan dampak anggaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat praktis

a) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang dapat membantu bagi pemerintah di Pulau Madura dalam pemecahan masalah terkait kemiskinan di pulau madura.

b) Bagi mahasiswa prodi ekonomi pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menambah pengetahuan dalam program studi ekonomi pembangunan dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan dana desa memberikan pengaruh terhadap kemiskinan.

c) Bagi peneliti

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi dan masukan bagi peneliti lain dengan tema yang serupa.